KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon.3500901; Fax. 3521967

NOTULEN RAPAT TIM PELAKSANA EITI

Hari/Tanggal	:	Kamis, 2 Februari 2017
Waktu	:	13.30 – 15.30 WIB
Tempat		Ruang Rapat Serayu Lantai 3, Gedung Ali Wardhana Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
Agenda	:	1. Progress Report Laporan EITI 2014 2. Pembahasan Data Portal 3. Pengunduran Diri *Indonesia Petroleum Association* (IPA) dari Tim Pelaksana 4. *Commodity Trading* 5. EITI Award 6. Rencana Kunjungan EITI Internasional.
Peserta Rapat Pemerintah	:	1. Kementerian Perekonomian, Kedeputian III: Bastian H, Marentyas 2. Kemenko Perekonomian, Kedeputian I: Ratih P Kania 3. Setjen ESDM: Aditya Hartono 4. Ditjen Migas, Kementerian ESDM: Tunggal, Risty Roisatul 5. Ditjen Pajak, Kemenkeu : Ahmad Zaky Zamani, Chenris C 6. Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu: Sigit Harjanto 7. Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu: Bambang RR, Mulyono 8. Ditjen Anggaran: Kemenkeu: Robby Martaputra, Fauziah Astrini 9. BPKP:Setiawan Juliarso, Dedi Nugroho 10. SKK Migas: Selvi, Sondang Maria
Pemerintah Daerah	:	Setda Riau: Rudy Hartono
Asosiasi Industri dan Perusahaan	:	APBI-ICMA: Supriatna Suhala Pertamina: Yogi Utomo
Masyarakat Sipil	:	PWYP dan koalisi: Aryanto Nugroho, Meliana, Asri Nuraeni,
Bank Dunia	:	Noriko T, Nat Adams, Prasetya
Sekretariat EITI	:	Edi Effendi, Ronald Tambunan, Agus Trianto, Doni Erlangga, Andrian, Anggi Gartika
Ernst and Young (EY)	:	Izhari, Liliana, Dwi Wijayanti, Dinar, Ika M, Inez, Antania, David, Phebe, Gracia

A. PEMBUKAAN

Asisten Deputi Industri Ekstraktif selaku Koordinator Nasional EITI, Bpk Bastian Halim membuka rapat dan kemudian menyampaikan agenda terutama penyampaian progress penyelesaian Laporan EITI 2014, dimana Tim Pelaksana harus bersikap untuk dapat menyelesaikan laporan di akhir Februari 2017. Bpk Bastian juga menyampaikan agenda lainnya yaitu Pembahasan Data Portal, Pengunduran Diri *Indonesia Petroleum Association* (IPA) dari Tim Pelaksana, Commodity Trading, EITI Award, dan Rencana Kunjungan EITI Internasional. Ketua Tim Sekretariat EITI, Bpk Edi Tedjakusuma menambahkan bahwa PT Ernst and Young (EY) telah mulai bekerja sebagai Independent Administrator (IA) sejak 5 Desember 2016 dan Laporan EITI 2014 diharapkan selesai pada akhir Februari 2017. Laporan seharusnya diserahkan ke EITI Internasional pada akhir tahun 2016, namun karena ada sejumlah permasalahan Laporan belum selesai. Tim Pelaksana telah mengajukan pengunduran batas waktu penyerahan laporan hingga akhir Februari, sehingga Laporan harus diserahkan ke EITI Internasional pada akhir Februari. Laporan harus dapat dipublikasikan sebelum dilaksanakannya Rapat Dewan EITI di Bogoto, Kolombia pada awal maret 2017.

B. PEMBAHASAN

1. Presentasi *Independent Administrator* (IA) untuk Progress Penyelesaian Laporan EITI 2014

Disampaikan oleh Bpk Izhari Mawardi. PT Ernst and Young (EY) sebagai Independent Administrator (IA) terus bekerja untuk menyelesaikan Laporan EITI 2014 dengan tenggat waktu hingga akhir Februari 2017. Progress penyelesaian laporan disampaikan EY dalam rapat. Laporan EITI terbagi menjadi laporan kontekstual dan laporan rekonsiliasi. Penyelesaian laporan kontekstual sudah mendekati 90% yang dibagi menjadi 6 bagian yaitu: pendahuluan dan latar belakang, tata kelola industri ekstraktif, proses perizinan dan penetapan wilayah kerja migas dan wilayah pertambangan minerba, pengelolaan industri ekstraktif di Indonesia, pengelolaan penerimaan negara dari industri ekstraktif, Badan Usaha Milik Negara, tanggung jawab lingkungan hidup dan sosial.

Presentasi Laporan Rekonsiliasi disampaikan oleh Ibu Liliana. Penyelesaian laporan rekonsiliasi masih terhambat dengan sejumlah perusahaan yang tidak/belum menyerahkan template laporan EITI ke Sekretariat EITI. Untuk perusahaan operator di sektor migas, dari entitas pelapor 72 perusahaan telah terkumpul 68 laporan perusahaan atau 94%, sedangkan perusahaan mitra telah terkumpul 89 laporan dari entitas pelapor 104 perusahaan atau 86%. Total laporan rekonsiliasi sektor migas telah terkumpul 157 laporan dari 176 perusahaan atau 89 %. Untuk sektor minerba, dari 119 perusahaan baru terkumpul 48 laporan perusahaan atau baru 48%. Hal itu disebabkan masih banyaknya perusahaan pemagang IUP yang tidak/belum melapor yaitu dari 81 perusahaan baru 23 yang melapor atau 28%. Walaupun banyak yang belum melapor, namun nilai royalti dan PHT dari 48 perusahaan yang telah melapor sangat besar atau mencakup 81,17% dari total penerimaan royalti dan PHT untuk sektor minerba. Sedangkan nilai rekonsiliasi terhadap total penerimaan negara untuk perusahaan migas yang telah melapor yaitu 97.5% dan yang belum melapor 2,5%. Untuk instansi pemerintah, dari 7 instansi yang telah memberikan laporan 7 instansi atau telah 100% dengan catatan khusus Ditjen Pajak belum seluruhnya karena disampaikan parsial sesuai terkumpulnya surat otorisasi perusahaan. Untuk Pemerintah Daerah baru 33% karena dari 3 provinsi, baru 1 yang menyerahkan laporan tentang Dana Bagi hasil (DBH).

Tanggapan:

- Bpk Edi menyampaikan bahwa laporan kontekstual telah 90 % selesai. Untuk laporan rekonsiliasi tak ada permasalahan di sektor migas, namun di sektor minerba terdapat permasalahan dengan masih banyaknya perusahaan yang belum memberikan template laporan. Walaupun jumlah perusahaan yang melapor masih kecil, namun dari sisi penerimaan sudah besar yaitu lebih dari 80% total penerimaan negara dari sektor minerba. Untuk Pemerintah Daerah masih 2 dari 3 provinsi yang belum memberikan data DBH ke Sekretariat EITI. Diharapkan tanggal 7 Februari data dapat dikumpulkan semaksimal mungkin. Bpk Edi memohon bantuan kepada asosiasi dan Pemda yang hadir dalam rapat untuk membantu mendorong perusahaan-perusahaan yang belum melapor.

- Sekretariat EITI pada tanggal 30 Januari telah mengundang perusahaan-perusahaan terutama minerba yang belum melapor dan 18 perusahaan hadir dalam rapat tersebut. Saat ini data yang telah terkumpul dari sektor minerba adalah 82% dari total penerimaan sektor minerba, apabila 18 perusahaan tersebut menyampaikan template laporan diperkirakan 85% - 90% data dari total penerimaan negara sektor minerba dapat direkonsiliasi. Hari senin berikutnya yaitu tanggal 6 Februari, Sekretariat juga akan kembali mengundang perusahaan-perusahaan yang belum menyerahkan template laporan.

- Dijadwalkan tanggal 7 Februari adalah batas waktu pengumpulan template laporan, tanggal 17 Februari draft laporan akan dikirimkan ke Tim Pelaksana, tanggal 20 atau 21 Februari kembali akan dilaksanakan Rapat Tim Pelaksana untuk membahas draft Laporan EITI. Laporan diharapkan dapat dipublikasikan pada tanggal 28 Februari 2017. Kontrak EY yang seharusnya selesai pada tanggal 20 Februari akan diperpanjang hingga tanggal 28 Februari. Data yang mungkin ada setelah Laporan EITI selesai tak akan dimasukkan di laporan, namun akan menjadi database Sekretariat EITI.

- Bpk Aryanto (PWYP) menyampaikan usulan agar email ke perusahaan juga dicc ke KPK, Bappenas, dan KSP karena EITI termasuk dalam program Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK). Walaupun batas waktu sudah sempit, tapi jangan sampai melupakan substansi. Untuk pembahasan yang panjang seperti pembukaan kontrak, data kadaster seperti Minerba One map Indonesia (MOMI) dapat dibahas dengan rapat sehari dengan mengundang Kementerian ESDM agar ada kesepakatan data apa yang bisa dibuka. CSO juga mengusulkan agar iuran tetap atau land rent direkonsiliasi dan penambahan data cost recovery walaupun tak perlu direkonsiliasi.

- Bpk Edi menyetujui pengiriman permintaan template ke perusahaan dengan dicc ke KPK, KSP dan Bappenas, namun harus dibicarakan lagi ke yang bersangkutan. Hal-hal yang bersifat teknis akan dibicarakan lagi pada Rapat Tim Teknis yang akan dilaksanakan minggu depan dengan mengundang Kementerian ESDM.

- Bpk Aryanto menyampaikan apabila ada data cost recovery bisa disusulkan di laporan setelah tanggal 28 Februari, atau dimasukkan di Laporan 2015. Bpk Edi menyampaikan bahwa akan aneh kalau dimasukkan di Laporan 2015, data yang ada setelah tanggal 28 Februari akan menjadi database. Untuk iuran tetap/landrent, Bpk Aryanto mengatakan seharusnya direkonsiliasi seperti pada Laporan pertama EITI, dan kenapa tak ada di Scoping 2014. EY mengatakan bahwa data land rent perusahaan ada namun hingga saat ini tidak direkonsiliasi. Bpk Supriatna Suhala (APBI) mengatakan data land rent sangat bisa direkonsiliasi asal tersedia datanya. Bpk Edi mengatakan akan menindaklanjuti ke Pak Johnson (DJ Minerba) terkait ketersediaan data land rent.

- Bpk Rudi Hartono, Dinas ESDM Riau: Laporan DBH dari Provinsi Riau telah tersedia. Pemerintah Daerah juga membutuhkan pembukaan informasi tentang Cost Recovery dan DBH.

- Bpk Edi menyampaikan bahwa EITI telah sounding tentang EITI Daerah. Untuk Laporan EITI data yang terkumpul setelah tanggal 28 Februari akan menjadi database. Kami telah menyampaikan ke EITI Internasional bahwa tanggal 28 Februari Laporan akan dipublikasikan karena apabila belum maka tanggal 1 Maret keanggotaan EITI Indonesia otomatis terkena suspensi. Batas waktu pengumpulan template laporan hingga tanggal 7 Februari, namun apabila ada template laporan dari perusahaan dengan revenue besar akan diakomodasi hingga tanggal 10 Februari.

- Bpk Aryanto : karena kurang kuat pengajuan pengunduran batas waktu pelaporan, bagaimana kalau tanggal 28 Februari selain menyerahkan laporan juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan EITI seperti BO dan aksi PPK. Bpk Edi mengatakan bahwa hal itu telah dilakukan saat mengirimkan surat permohonan pengunduran batas waktu pelaporan.

2. Pembahasan Data Portal

Bpk Edi menyampaikan bahwa EITI Indonesia dengan dukungan Bank Dunia sedang menyelesaikan Data Portal yang diharapkan dipublikasikan tahun 2017 ini. Sumber utama data untuk portal tersebut adalah laporan EITI. Sedangkan data tambahan berasal dari BPS, meliputi: Ketenagakerjaan (nasional & provinsi), ekspor & impor, PDB, dan PDRB, Kemenperin tentang data ekspor dan impor, serta LKPP untuk data DBH Provinsi dan Kabupaten. Yang menjadi pertanyaan apakah akan diberi nama EITI Data Portal atau *Extractive Industries* (EI) Data Portal? Bank Dunia mengusulkan EI Data Portal, namun yang akan mengelola Sekretariat EITI. Sumber data utama dari Laporan EITI walaupun ada sumber tambahan.

Bpk Aryanto mengatakan bahwa dengan menggunakan nama EI takutnya akan ada perbedaan definisi sehingga ditakutkan akan ada yang salah mengutip data, misalkan adanya perbedaan data dengan BPS. Namun untuk nama sebenarnya tak begitu berpengaruh, yang penting mitigasi.

Bpk Bastian: Lebih baik menggunakan nama EI karena walaupun sekarang cakupan sempit, namun Kemenko Perekonomian mengharapkan ke depannya akan lebih luas. Untuk siapa pengelolanya akan dicarikan solusi ke depannya apabila cakupan makin luas.

3. Pengunduran Diri *Indonesia Petroleum Association* (IPA) dari Tim Pelaksana

- Bpk Edi: Direktur Eksekutif *Indonesia Petroleum Association* (IPA), Marjolin Wajong mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan Tim Pelaksana EITI melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Tim Pelaksana tertanggal 17 Januari 2017. Alasan IPA adalah organisasi independen yang tak ada hubungannya dengan penyusunan laporan keuangan anggota IPA. IPA juga mengusulkan agar EITI langsung berkoordinasi dengan SKK Migas untuk segala urusan terkait perusahaan-perusahaan migas. Beberapa opsi yang ditawarkan dalam pengajuan pengunduran diri ini yaitu penggantian IPA dengan organisasi migas lainnya, IPA tetap diminta sebagai anggota, atau Opsi lainnya (dengan masukan dari Ditjen Migas dan SKK Migas).

- Bpk Bastian menanyakan kontribusi IPA, kalau kurang berkontribusi bisa dicari gantinya. Bpk Edi mengatakan kontribusi IPA beberapa kali hadir tapi kurang aktif.

- Bpk Tunggal (Ditjen Migas) mengatakan bahwa IPA mewakili KKKS jadi harus ada di Tim Transparansi.

- Bpk Aryanto mengatakan harus dicari jawabannya kenapa ada pengajuan pengunduran diri apakah karena kesibukan atau tak sesuai kepentingan. Takutnya apabila menyebar ke media massa akan jadi salah persepsi. IPA bisa diajak bicara dulu. Untuk Tim Pelaksana adalah aspek keterwakilan sehingga kalaupun diganti tak masalah.

- Ibu Selvi (SKK Migas): IPA merupakan lembaga kontraktor dan tak ada lainnya. Dulu Pak Dipnala aktif, mungkin sekarang Bu Marjolin terlalu sibuk sehingga perlu dijelaskan ke IPA apa tujuan EITI. Pak Supriatna menambahkan yang penting komitmen apabila tak bisa dapat diganti wakil lain dari IPA.

- Bpk Edi: Nanti IPA akan diundang Kemenko bersama SKK Migas dan Ditjen Migas. SKK Migas diharapkan bantuannya untuk sounding dulu ke IPA.

4. Commodity Trading

- Bpk Edi: Indonesia menjadi negara Pilot transparansi *Commodity Trading*. Sejumlah kegiatan akan dilakukan untuk menyelesaikan laporan terkait *Commodity Trading* mulai dari persetujuan TOR, pengadaan konsultan, kegiatan-kegiatan FGD dan workshop, hingga persetujuan MSG. Output dari kegiatan ini yaitu laporan *commodity trading* terkait sektor migas. Apakah scope sudah cukup yaitu hanya ekspor dan tak ada informasi impor, dan hanya informasi migas tak termasuk minerba?

- Bpk Tunggal (DJ Migas): Kenapa tak ada minerba? Kalau kita transparan seharusnya kita juga mendapatkan informasi dari negara lain.

- Bp Edi : Ini pilot untuk menentukan standar *commodity trading* yang nantinya akan dilaksanaan di 51 negara pelaksana EITI. Jadi negara lain juga harus transparan.

- Ibu Selvi : Yang ada di scope hanya materi in kind/volume yang ada di sektor migas. Sedangkan minerba berdasarkan royalti. Jadi yang ada di scope hanya sektor migas.

5. EITI Awards

Bpk Edi: EITI berencana memberikan penghargaan Industri Ekstraktif untuk para stakeholder. Untuk tahap pertama penghargaan akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan ekstraktif. Sumber dari pemberian penghargaan yaitu laporan EITI dan survei tambahan (apabila diperlukan). Kriteria penilaian berdasarkan kriteria transparansi yaitu informasi yang wajib disampaikan di Laporan EITI, informasi tambahan, partisipasi publik dlm pengelolaan perusahaan (datanya harus survei), dan Ketepatan waktu penyampaian laporan. Sedangkan kriteria Akuntabilitas yaitu rasio pembayaran pajak, CSR, jumlah tenaga kerja lokal (harus survei), dan Keterlibatan perusahaan dlm EITI (surat otorisasi). Usulan nama penghargaan yaitu Penghargaan Transparansi Industri Ekstraktif atau Penghargaan Transparansi EITI Indonesia. Untuk alternatif pertama akan sedikit tidak cocok apabila daerah dan CSO juga mendapatkan penghargaan dengan nama penghargaan tersbut.

6. Rencana Kunjungan EITI Internasional

- Bpk Edi: Sekretariat EITI telah melakukan koordinasi melalui skype dengan Sekretariat EITI Internasional pada tanggal 31 Januari 2017. EITI Internasional menyampaikan rencana kunjungan ke Indonesia. Direktur Regional Asia Pasifik EITI, Gay Ordenes berencana berkunjung ke Indonesia pada minggu ketiga dan keempat Maret 2017. Diharapkan pada tanggal tersebut akan ada pertemuan terkait *Commodity Trading* dan *Beneficial Ownership* di Indonesia. Sementara, Ketua Dewan EITI Fredrik Reinfeldt dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 6-8 Juni 2017.

C. PENUTUP

Bpk Bastian menutup rapat dengan menyampaikan agar semua keputusan rapat agar ditindaklanjuti.

D. HASIL KESEPAKATAN RAPAT

1. Tim Pelaksana EITI menyetujui batas waktu pengumpulan template laporan perusahaan hingga 7 Februari. Tanggal 20 atau 21 Februari akan dilaksanakan Rapat Tim Pelaksana untuk membahas draft final Laporan, agar pada tanggal 28 Februari 2017 Laporan EITI 2014 dapat dipublikasikan. Data yang terkumpul setelah laporan selesai tak akan dimasukkan dalam laporan namun akan dimasukkan dalam database.
2. Iuran tetap atau Land Rent dapat direkonsiliasi asal data tersedia dan adanya ketersediaan waktu sebelum batas waktu penyelesaian. Hal teknis lainnya akan dibicarakan di Rapat Tim Teknis yang akan dilaksanakan di pertengahan Februari.
3. Tim Pelaksana menyetujui Portal Data dengan nama Industri Ekstraktif Data Portal.
4. Tim Pelaksana belum menyetujui pengunduran diri IPA dari Tim Pelaksana dan akan dilakukan komunikasi dengan IPA terkait pengajuan pengunduran diri.
5. Laporan *Commodity Trading* hanya mencakup sektor migas dan tak mencakup sektor minerba serta hanya informasi tentang ekspor dan tak meliputi impor.
6. Pemberian penghargaan kepada perusahaan terkait transparansi akan segera dilaksanakan.